

**PROPOSAL**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**Pendampingan Pengelolaan Keuangan UMKN Bengkulu Tengah Berbasis Asset  
Based Community Development (ABCD)**

**Oleh :**

Prof. Dr. Kamaludin, SE.MM	NIDN.0004036607
Dr. Fitri Santi,SE.M.S.M	NIDN.0006107503
Dr.M. Dewi Rahmayanti,SE, M.S.M	NIDN.0005078104
Eka Sri Wahyuni	NIM. C3B024003

**PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BENGKULU**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

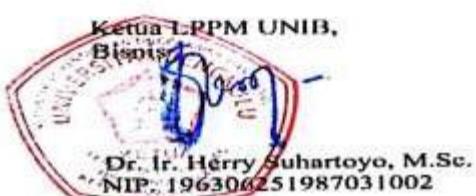
1. Judul : Pendampingan Pengelolaan Keuangan UMKM Bengkulu Tengah Berbasis Aset Base Communiti Development (ABCD)

1. Nama Lengkap : Prof. Dr. Kamaludin, SE.MM
2. NIP : 196603041998021001
3. Jabatan Golongan : Guru Besar
4. Program Studi : Manajemen
5. Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu
2. Anggota Tim Pengusul
  - a. Jumlah Anggota : Dosen 2 Orang
  - b. Nama Anggota : 1. Dr. Fitri Santi,SE.MSM  
2. Dr.M. Dewi Rahmayanti,SE, M.S.M
3. Mahasiswa yang terlibat : 1. Eka Sri Wahyuni NIM. C3B024003
4. Lokasi Kegiatan/Mitra :
  - a. Wilayah Mitra : UMKM
  - b. Kabupaten/Kota : Bengkulu Tengah
  - c. Provinsi : Bengkulu
5. Jangka Waktu Pelaksanaan:
6. Pembiayaan : Rp.5.000.000,-



Bengkulu, 10 Maret 2025  
Ketua,

Prof. Dr. Kamaludin, SE.MM  
NIP 196603041998021001



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Analisis Situasi

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bengkulu Tengah. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM di Indonesia menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Oleh karena itu, penguatan sektor ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, UMKM di Bengkulu Tengah masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha mereka. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM, yang berdampak pada kesulitan dalam menyusun laporan keuangan dan melakukan perencanaan bisnis yang efektif. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya pencatatan keuangan yang rapi, sehingga sulit bagi mereka untuk mengevaluasi kinerja usaha serta mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Selain itu, ketidaktepatan dalam menghitung Harga Pokok Produksi (HPP) juga menjadi masalah yang sering dihadapi. HPP yang dihitung secara tidak akurat dapat menyebabkan penentuan harga jual yang kurang kompetitif, baik terlalu tinggi sehingga sulit bersaing di pasar maupun terlalu rendah sehingga tidak menutupi biaya produksi. Akibatnya, banyak UMKM mengalami kesulitan dalam mempertahankan profitabilitas dan keberlanjutan usahanya.

Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dapat menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan ini. ABCD menekankan pada pemanfaatan aset yang telah dimiliki oleh komunitas sebagai basis pengembangan ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini, UMKM dapat didorong untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada, baik dari segi keterampilan, bahan baku, maupun jaringan sosial, guna memperkuat daya saing dan meningkatkan kapasitas manajerial mereka dalam pengelolaan keuangan. Implementasi ABCD dalam

pengelolaan keuangan UMKM dapat membantu pelaku usaha dalam memahami potensi mereka serta menerapkan strategi bisnis yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, diperlukan upaya nyata untuk memberikan pendampingan kepada UMKM di Bengkulu Tengah agar mereka dapat lebih memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik serta mampu menerapkan prinsip-prinsip ABCD dalam pengembangan usaha mereka. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka secara lebih profesional, sehingga mampu berkontribusi lebih optimal terhadap perekonomian lokal.

## **1.2 Permasalahan**

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi UMKM di Bengkulu Tengah dalam pengelolaan keuangan adalah:

1. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sederhana.
2. Ketidaktepatan dalam menghitung HPP, sehingga harga jual produk tidak kompetitif.
3. Minimnya pemanfaatan aset lokal dalam pengembangan usaha.
4. Rendahnya literasi keuangan yang menghambat akses UMKM terhadap sumber pendanaan yang lebih luas.

## **1.3 Solusi Mengatasi Masalah**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, program pengabdian ini mengusulkan beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis pencatatan sederhana.
2. Pengenalan dan penerapan metode perhitungan HPP yang akurat.
3. Penerapan pendekatan ABCD untuk mengoptimalkan aset lokal dalam mendukung keberlanjutan UMKM.
4. Edukasi literasi keuangan guna meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pendanaan formal dan non-formal.

## **1.4 Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha mereka secara lebih baik.
2. Mengajarkan metode perhitungan HPP yang tepat agar dapat menentukan harga jual yang kompetitif.
3. Memanfaatkan aset komunitas dalam mendukung perkembangan UMKM berbasis ABCD.
4. Meningkatkan literasi keuangan UMKM agar lebih mudah mengakses permodalan.

### **1.5 Manfaat Kegiatan**

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi:

1. UMKM dapat mengelola keuangan dengan lebih baik sehingga meningkatkan profitabilitas usaha.
2. Pelaku UMKM memiliki kemampuan menghitung HPP yang akurat guna menentukan strategi harga yang lebih kompetitif.
3. Optimalisasi aset lokal dalam pengembangan usaha berbasis komunitas.
4. Meningkatnya literasi keuangan UMKM yang membuka peluang akses modal dari berbagai sumber.

### **1.6 Sasaran**

Sasaran kegiatan ini adalah pelaku UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah yang bergerak di berbagai sektor usaha, terutama yang mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan dan perhitungan HPP.

### **1.7 Luaran**

Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini meliputi:

1. Modul pelatihan pengelolaan keuangan sederhana untuk UMKM.
2. Panduan praktis perhitungan HPP untuk UMKM.
3. Model penerapan pendekatan ABCD dalam pengelolaan UMKM.
4. Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan dan akses permodalan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi (Tambunan, 2019).<sup>1</sup> Namun, tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam menentukan Harga Pokok Produksi (HPP) secara akurat (Susilawati & Kurniawan, 2020)<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki aset maksimal Rp50 juta, usaha kecil Rp50 juta hingga Rp500 juta, dan usaha menengah Rp500 juta hingga Rp10 miliar<sup>3</sup>. Kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan akan sangat menentukan daya saing dan keberlanjutan usahanya.

#### 2.2 Harga Pokok Produksi (HPP) dalam Pengelolaan Keuangan UMKM

HPP adalah total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi suatu barang atau jasa hingga siap dijual (Hansen & Mowen, 2018). <sup>3</sup>HPP terdiri dari tiga komponen utama:

1. Biaya Bahan Baku – mencakup bahan utama yang digunakan dalam produksi.
2. Biaya Tenaga Kerja Langsung – upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang terlibat langsung dalam produksi.

---

<sup>1</sup> Tambunan, T. (2019). UMKM di Indonesia: Isu, Tantangan, dan Kebijakan. Jakarta: LP3ES

<sup>2</sup> Susilawati, C., & Kurniawan, A. (2020). "Penerapan Metode Harga Pokok Produksi dalam Pengelolaan Keuangan UMKM." Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 15(1), 45-56.

<sup>3</sup> Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2018). Cost Management: Accounting and Control (7th ed.). Cengage Learning.

3. Biaya Overhead Pabrik – biaya lain yang berkaitan dengan produksi, seperti listrik, sewa tempat, dan penyusutan alat produksi.

Kesalahan dalam perhitungan HPP dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam menentukan harga jual, yang berakibat pada rendahnya profitabilitas UMKM (Putra, 2021). <sup>4</sup>Oleh karena itu, penerapan metode yang tepat dalam perhitungan HPP sangat penting untuk meningkatkan efisiensi usaha UMKM.

### **Konsep Asset-Based Community Development (ABCD)**

Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD)\* adalah metode pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada pengidentifikasi dan pemanfaatan aset lokal sebagai modal utama dalam pengembangan ekonomi masyarakat (Kretzmann & McKnight, 1993).<sup>5</sup>

Pendekatan ABCD memiliki lima prinsip utama:

1. Fokus pada Aset yang Dimiliki – mengidentifikasi dan memanfaatkan aset komunitas sebagai modal utama dalam pembangunan ekonomi.
2. Membangun Relasi Sosial – memperkuat jaringan antar individu dan organisasi di dalam komunitas.
3. Mendorong Partisipasi Masyarakat – melibatkan komunitas secara aktif dalam pengambilan keputusan dan implementasi program.  
Kolaborasi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan – bekerja sama dengan pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.
4. Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian – memberdayakan masyarakat agar dapat mengelola sumber daya secara berkelanjutan (Green & Haines, 2012).<sup>6</sup>

Penerapan pendekatan ABCD dalam pendampingan UMKM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keuangan mereka dengan memanfaatkan aset yang telah

---

<sup>4</sup> Putra, M. A. (2021). "Analisis Pendekatan Asset-Based Community Development dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal." Jurnal

<sup>5</sup> Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets. ACTA Publications.

<sup>6</sup> Green, G. P., & Haines, A. (2012). Asset Building & Community Development (3rd ed.). SAGE Publications.

ada. Dalam konteks pengelolaan keuangan UMKM, ABCD dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, meningkatkan efisiensi tenaga kerja, serta memperbaiki strategi pemasaran dan distribusi.

### **2.3 Hubungan ABCD dengan HPP dalam Pengelolaan Keuangan UMKM**

Pendekatan ABCD dapat diterapkan dalam pengelolaan HPP dengan cara:

1. Menggunakan sumber daya lokal untuk menekan biaya produksi.
2. Memanfaatkan tenaga kerja komunitas untuk mengurangi biaya tenaga kerja eksternal.
3. Meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan dengan memberdayakan pemasok lokal.

Penelitian oleh Putra (2021) menunjukkan bahwa UMKM yang menerapkan prinsip ABCD dalam pengelolaan HPP mampu meningkatkan efisiensi produksi hingga 20%<sup>5</sup>. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan ABCD dapat menjadi strategi yang efektif dalam membantu UMKM meningkatkan daya saing dan profitabilitas mereka.

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **1. Lokasi Kegiatan**

Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlokasi di Bengkulu Tenah, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.

#### **2. Khalayak Sasaran**

Dosen dan Mahasiswa Angkatan XII Program Studi Manajemen S3 Universitas Bengkulu yang terdiri dari 10 Orang Dosen dan 10 mahasiswa. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengabdian ini adalah UMKM Bengkulu Tengah. Sedangkan, metode pelaksanaan kegiatan Aset Based Community Development. Pa (ABCD). merupakan penyadaran Masyarakat mengenai potensi dan masalah yang ada serta mendorong keikutsertaan atau partisipasi Masyarakat dalam kegiatan perubahan yang akan dilaksanakan.

Khalayak sasaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Masyarakat yang diundang dalam kegiatan pelatihan ini sesuai dengan judul kegiatan PKM adalah Pelaku UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### **3. Jenis Kegiatan**

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada pelaku UMKM sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam Program ini ditawarkan beberapa metoda pendekatan yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada yaitu dengan melakukan Metode pelatihan dan pendampingan UMKM serta bimbingan, sehingga pelaku UMKM Kabupaten Bengkulu Tengah dapat sejahtera dan bahagia.

#### **4. Tahapan Kegiatan**

Kegiatan Pelaksanaan Program terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tahap monitoring. Berikut adalah rincian tiap tahapan yang akan dilaksanakan:

## **1. Tahap Persiapan**

### **a. Penyusunan program kerja pelatihan dan pendampingan**

Penyusunan program pelatihan dan program kerja pendampingan agar kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih teratur dan terarah. Program ini meliputi semua hal-hal yang bersifat teknis, manajerial dan penjadwalan (time schedule).

### **b. Penyusunan modul pelatihan**

Modul manajemen meliputi teknik pendampingan, penanganan dan penyuluhan berkesinambungan. Persiapan sarana dan prasarana pelatihan. Persiapan ini meliputi penyediaan sarana dan prasarana tempat pelatihan dan penyuluhan.

### **c. Koordinasi lapangan.**

Koordinasi lapangan akan dilakukan oleh Tim. Sosialisasi program bagi pelaku UMKM ini dilakukan di lokasi kegiatan yaitu sesuai area yang akan disepakati.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

### **a. Sosialisasi UMKM**

Sosialisasi bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci tentang tujuan dan manfaat UMKM serta memberikan penjelasan materi pelatihan dan pendampingan. Sosialisasi ini dipermudah dengan pembagian modul pelatihan. Kegiatan ini akan dihadiri oleh Bapak Bupati, perwakilan Bank Bengkulu, Perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bengkulu dan pelaku UMKM yang akan mengikuti program.

### **b. Pelatihan dan Pendampingan UMKM**

Pelatihan ini adalah tindak lanjut dari pada kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Pelatihan ini melalui metode praktik langsung dilapangan. Mitra yang telah diberikan teori yang ada pada modul kemudian langsung melakukan praktik UMKM. Kegiatan ini akan dibimbing oleh instruktur yang telah terlatih dalam pelaksanaan kegiatan UMKM. Pelatihan ini

diharapkan dapat dilakukan secara komprehensif dan kontinyu guna memastikan bahwa pelaku UMKM benar-benar paham dan menguasai secara mandiri.

### **3. Tahap Evaluasi**

Tahap Monitoring dan Evaluasi. Monitoring dilakukan secara intensif oleh tim pelaksana setiap kegiatan berlangsung untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan sejalan dengan monitoring, sehingga jika ada kendala akan segera diselesaikan. Evaluasi dilakukan setiap tahap kegiatan, adapun rancangan evaluasi memuat uraian bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan, kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan. Memberikan bimbingan kepada pelaku UMKM agar tetap terus menerapkan hasil pelatihan secara konsisten dan memaksimalkan pendampingan yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas bisnis yang dijalankan, dengan begitu dapat meningkatkan kinerja pelaku UMKM dan mendukung program pemerintah dalam meningkatkan angka perekonomian masyarakat.

